

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di bagian Asia Tenggara. Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau, wilayah, Provinsi, daerah, Ibukota, Kabupaten, Kecamatan hingga desa. Indonesia menerapkan sistem demokrasi, secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan, jadi secara bahasa *demos-cratos* atau demokrasi adalah negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹

Dalam hal ini demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.² Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Negara Republik Indonesia dipimpin oleh kepala Negara dan kepala pemerintahan yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dalam sistem

¹ Azyumardi Azra, (2000), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Jakarta, h.110

² M. Taupan, (1989), *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 21

demokrasi, pemimpin tersebut harus dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan, mekanisme memilih pemimpin – pemimpin yang diusung oleh partai politik dan atau melalui jalur independen untuk berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan suara terbanyak untuk menduduki jabatan publik.³ Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan kepala desa.

Pemilihan umum atau pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada masa orde lama pada tahun 1955 dilakukan untuk memilih anggota DPR, lalu pada masa orde baru pemilu dilaksanakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lalu pada masa orde reformasi pemilu berlangsung sejak tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilihan umum dilakukan pada tingkat Provinsi, Kota atau Kabupaten, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), pertama kali dilaksanakan tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kali rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung maka masyarakat akan bersikap aktif dalam pelaksanaan partisipasi politik. Menurut Syarbaini partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang

³ Tareh Rasyid, (2017), *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Idea Press, h. 88

dilakukan oleh pemerintah.⁴ Dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat memerlukan adanya sarana politik yaitu partai politik.

Partai politik adalah organisasi resmi yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggotanya dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Proses pemilu tidak terlepas dari partai politik, karena partai politik dapat menyalurkan aspirasi rakyat, dimana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu. Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan harus diikuti sertakan dalam proses politik. Maka dari itu partai politik lahir sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.⁵

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Suatu negara tidak dapat dikatakan demokrasi jika di sebuah negara tersebut tidak memiliki partai politik, karena pada hakikatnya partai politik manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat dari suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Artinya kebebasan hak asasi manusia ini adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi.

⁴ Syarbaini Syahrial, (2011), *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, h. 123

⁵ Muhadam Labolo, (2015), *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* Jakarta PT RajaGrafindo Persada, h. 11

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang berdirinya partai politik tersebut. Sedangkan fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Di Indonesia terdapat banyak partai politik yang berkembang terutama dalam suasana pemilihan kepala daerah di tahun 2017. Partai politik pada dasarnya adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena melalui partai politik maupun organisasi dapat menjadi sarana alat bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya.

Dalam melaksanakan pesta demokrasi Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan Ibukota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Kabupaten Musi Banyuasin bermotto *Bumi Serasan Sekate* dengan Ibukota Sekayu *Kota Randik* ("Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan"). Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan diantaranya Babat Supat, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Tungal Jaya.

⁶ Firmanzah, (2011), *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h.31

Pada tahun 2017 pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Musi Banyuasin, untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten atau sering disebut dengan pemilihan Bupati. Dalam pemilihan tersebut terdapat 2 kandidat yaitu pasangan Dodi Reza Alex – Beni Hernedi dan pasangan Amiri Arifin – Ahmad Toha. Dodi Reza Alex merupakan putra sulung Alex Noerdin yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Pada tahun 2012 lalu, Dodi Reza maju sebagai calon bupati Musi Banyuasin namun kalah melawan pasangan Pahri Azhari dan Beni Hernedi.

Pada saat pilkada Musi Banyuasin 2017 pasangan calon pertama, Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati bersama Beni Hernedi sebagai Wakil Bupati dengan partai pengusung 11 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan pasangan calon kedua, Amiri Aripin sebagai Bupati bersama Ahmad Toha, sebagai Wakil Bupati dengan pengajuan secara independen.⁷

⁷ KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017". *Pilkada 2017.kpu.go.id*. Diakses tanggal 20 Desember 2018

Dalam pemilihan ini terpilihlah Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati, perolehan suara untuk pasangan Dodi sebesar 212.800 suara. Rincian jumlah dan persentase dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1

Tabel Rekapitulasi Suara Dodi Reza dan Beni Hernedi pada Pilkada Musi

Banyuasin 2017⁸

Kecamatan	Babat Supat	Babat Toman	Batang Hari Leko	Bayung Lencir	Keluang	Lais	Lalan
Persentase	74,60 %	83,14 %	71,10 %	73,83 %	83,69 %	72,57 %	90,38%

Kecamatan	Lawang Wetan	Plakat Tinggi	Sangat Desa	Sekayu	Sungai Keruh	Sungai Lilin	Tungkal Jaya
Persentase	66,84 %	87,90 %	72,02 %	87,00 %	82,07 %	71,41 %	74,81 %

Jumlah DPT	468.390
Partisipasi berdasarkan Suara Sah	58% atau 271.044 suara
Golput	42% atau 197.346 suara

Dari data diatas terlihat bahwa angka golput pada pilkada Musi Banyuasin sangat besar, yaitu 42% masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi tanda tanya besar karena

⁸ Sumber data KPU Musi Banyuasin 2017

pasangan Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi diusung oleh 11 partai politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan berikutnya tentang peran dan kekuatan ke-11 partai politik tersebut.

Hal ini dibuktikan pada data rekapitulasi suara Dodi Reza Alex pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 di atas yang menyatakan bahwa angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 mencapai 42%. Jumlah pemilih berdasarkan DPT 468.390 sedangkan pemilih yang menyalurkan suaranya sebanyak 271.044 pemilih atau 58%. Padahal pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi yang diusung 11 Partai menang diangka 78,49% atau 212.800 suara. Sementara pasangan Independen Amiri Aripin dan Ahmad Toha mendapatkan 21,51% atau 58.244 suara.

Ternyata partai-partai politik pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi, yang berfungsi sebagai mesin politik untuk memenangkan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi tidak berhasil memberikan kemenangan yang layak. Terbukti 42% pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai fungsi partai politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017, dengan judul “Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin Tahun 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Paslon Dodi Reza Alex Dan Beni Hernedi).” Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti 6 (enam) partai saja yaitu Partai Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB dan Hanura.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana fungsi partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi dinilai dari hasil perolehan suara pada Pilkada Musi Banyuasin 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi partai politik dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah
2. Untuk memberikan penilaian terhadap fungsi partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi berdasarkan hasil perolehan suara pada Pilkada Musi Banyuasin 2017.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu politik dan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana seharusnya partai-partai politik memainkan fungsinya dalam memenangkan sebuah pertarungan politik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan informasi mengenai, sejauh mana partai-partai politik pengusung Dodi Reza dan Beni Hernedi berfungsi. Informasi tersebut selanjutnya berguna untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan, ataupun bahan pertimbangan bagi para praktisi politik tentang bagaimana seharusnya partai politik berfungsi dalam pertarungan politik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Penelitian mengenai fungsi partai politik memang telah banyak dilakukan, hal ini dapat menjadi rujukan karena menunjukkan kesamaan dan keragaman dari berbagai segi. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan dan acuan dalam penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti adalah penelitian oleh M. Aprizal (2017), Khoiri (2014), Sutanto (2011), Mushab Robani (2016), Wakhidatul Afifah (2011), dan Afen Sandika (2018).

M. Aprizal dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Memenangkan Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014*”.⁹ Menyebutkan bahwa PAN di Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil memenangkan pilkada dengan menggunakan 6 (enam) strategi.

⁹ M. Aprizal, (2017), Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Memenangkan Pemilu Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014, Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Strategi – strategi yang digunakan oleh PAN adalah sebagai berikut:

1. Jaringan politik
2. Menjalin komunikasi dan silaturahmi dari desa ke desa
3. Membentuk tim koalisi dengan partai lain
4. Pendekatan dengan masyarakat,
5. Aktor yang disenangi oleh masyarakat, karismatik dan dipandang pantas untuk memimpin masyarakat OKI
6. Program pembangunan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga sesuai dengan konsep tata negara Islam dimana dalam politik harus membangun jaringan dan mensejahterakan rakyat

Dari penelitian M. Aprizal diatas terbukti bahwa PAN menggunakan strategi dan konsisten melaksanakan strategi itu untuk memenangkan Pilkada di kabupaten OKI.

Selanjutnya Khoiri dalam skripsinya “*Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Yogyakarta 2011*”¹⁰ Skripsi ini membahas tentang strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada beberapa strategi yang digunakan oleh partai PDIP untuk memperoleh kemenangan pada Pilkada Yogyakarta 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Upaya tim sukses dalam menggunakan metode strategi politik berupa komunikasi politik yang efektif, baik terhadap masyarakat dan simpatisan

¹⁰ Khoiri, (2014), *Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Yogyakarta 2011*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

partai itu sendiri

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggunakan komunikasi politik yang kompleks, sisi verbalitas, non verbal serta simbol bahkan paduan keduanya.
3. Kemenangan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan hanya dipengaruhi oleh koalisi yang tepat dengan partai Golkar, tetapi juga kejelian pengamatan dalam merefleksikan momentum Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sebagai isu politik utama
4. Strategi politik internal partai pun dengan penguatan mekanisme kandidatisasi adalah strategi yang secara terstruktur dan jangka panjang yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan minimal pilkada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan maksimal pemilu 2014.

Dari penelitian Khoiri diatas terbukti bahwa PDIP bisa menang dalam pemilihan walikota Yogyakarta, dengan cara berjuang melaksanakan 4 (empat) strategi diatas, dan PDIP membuktikan bagaimana sebuah partai politik telah melaksanakan peran dan fungsinya dalam memenangkan paslonnya, dan memang seperti itu seharusnya. Dalam memenangkan pemilu setiap partai harus melakukan strategi agar memperoleh kemenangan.

Sutanto, dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Partai Demokrat*

dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang”,¹¹ mengatakan bahwa partai Demokrat memiliki beberapa strategi yang digunakan pada saat pemilihan umum legislatif 2009 di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam kemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang, antara lain:

1. Komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal
2. Sosialisasi
3. Event (kegiatan)
4. Kampanye
5. Money politik
6. Pencitraan meliputi figur
7. Citra partai

Dari hasil penelitian Sutanto diatas kita dapat melihat bahwa partai demokrat melakukan 7 (tujuh) hal untuk memenangkan paslonnya. Dengan melakukan ke 7 (tujuh) hal tersebut, partai demokrat berhasil memperoleh kemenangan sebanyak 28 % di seluruh daerah Kota Semarang dibandingkan seluruh partai-partai yang ada. Dan memang seperti itu seharusnya sebuah partai politik berperan dan berfungsi dalam memenangkan calon-calonnya.

Mushab Robani, dalam skripsinya “*Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik di kota Bandar Lampung (Studi*

¹¹ Sutanto, (2011), *Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang*, Semarang : Fakultas Sosial Universitas Negeri Semarang.

Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung."¹² Kajian ini menggunakan teori fungsi partai politik dalam konteks hukum tata negara. Sebagaimana fungsi partai politik sebagai:

1. Agen sosialisasi politik
2. Rekrutmen politik
3. Pengelola konflik
4. Komunikasi politik dan
5. Sebagai partisipasi politik

Studi ini juga menemukan beberapa kendala DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya, yang masih dianggap *eksklusif* oleh masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta. Disamping itu kendala ideologi Islam yang kental dari PKS, dan sistem pemilihan umum yang belum mengarahkan partai agar selaras dengan fungsi partai juga merupakan suatu kendala yang dialami oleh partai PKS.

Dari penelitian Mushab Robani memberikan gambaran bahwa DPD PKS Bandar Lampung telah melaksanakan 5 (lima) fungsi partai politik dengan melaksanakan ke 5 (lima) fungsi partai tersebut DPD PKS Bandar Lampung berhasil meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014.

Wakhidatul Afifah, dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai*

¹² Mushab Robani, (2016), *pelaksanaan fungsi partai politik Berdasarkan undang-undang partai politik di kotaBandar lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang”.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen anggota. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi PDI Perjuangan kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai. Mekanisme pendaftaran anggota dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, masa pembinaan, pelantikan dan sumpah, pengesahan, diberi KTA dan ditulis dibuku induk.
2. Rekrutmen pengurus, Implementasi rekrutmen pengurus DPC dilakukan melalui Konfercab setiap 5 (lima) tahun sekali. Perekrutan dimulai dengan memilih ketua DPC dari calon ketua yang namanya diusulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat PAC. Ketua terpilih menjadi ketua formatur yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyusun kepengurusan DPC.
3. Rekrutmen calon anggota legislatif, Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui tahap penjangaran, tahap penyaringan, dan tahap penetapan yang diatur dalam SK No 210/KPTS/DPP/V/2008
4. Rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Implementasi

¹³ Wakhidatul Afifah, (2011), *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

rekrutmen calon bupati dan/atau calon wakil bupati dilakukan melalui tahap penjangkaran, tahap penyaringan tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang diatur dalam SK No 031/KPTS/DPP/X/2009.

Dari penelitian Wakhidatul Afifah ia menjelaskan mengenai Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik, Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang. Terdapat 5 (lima) cara partai PDIP melakukan Rekrutmen terhadap partainya mulai dari anggota, pengurus, calon anggota legislatif hingga calon kepala daerah.

Afen Sandika dalam skripsinya yang berjudul “*Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017*”.¹⁴ Berdasarkan analisis yang ditemukan hasil peneliti bahwa partai PDI Perjuangan yang ada di Mesuji bisa dikatakan sudah menjalankan peran nya sebagai partai politik terhadap masyarakat. Bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan kabupaten Mesuji antara lain:

1. Dialog publik
2. Debat terbuka
3. Kampanye dialogis
4. Kelompok binaan atau mitra dan lain-lain yang sejenis dengannya.

¹⁴ Afen Sandika, (2018), Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017. Lampung : Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sedangkan strategi pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pola monitoring
2. Evaluasi dan agitasi,
3. Advokasi serta propokasi

Melalui strategi tersebut partai dengan mudah untuk masuk ke kehidupan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik meningkat. Penelitian Afen Sandika diatas menjelaskan mengenai Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017. Dalam penelitian tersebut PDI Perjuangan melakukan lima cara, dan tiga strategi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat pada Pilkada Mesuji 2017.

Dari ke 6 (enam) pustaka yang peneliti tinjau diatas, terlihat bagaimana sebuah partai berjuang keras agar bisa memenangkan paslonnya, dan terbukti partai-partai politik pengusung yang menjalankan peran dan fungsinya sehingga berhasil memenangkan pilkada. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan tentang fungsi ke 11 (sebelas) parpol pengusung Dodi Reza dan Beni Hernedi pada pilkada Musi Banyuasin 2017. Dapat dikatakan bahwa ke 11 (sebelas) partai politik tersebut dikalahkan oleh suara paslon independen dan suara golput.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Menurut Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut : *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (partai politik adalah organisasi dari aktivitas – aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).¹⁵

Menurut Joseph Schlesinger Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan jabatan-jabatan publik.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) pasal 1 ayat (1) yang dinamakan dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

¹⁵ Sigmund Neumann, (1963), *Modern Political Parties* dalam *Comparative Politics : A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, London : The Free Press of Glencoe, h. 352

¹⁶ Joseph Schlesinger, (2014), *Partai Politik*, Terj. Ahmad Asnawi, Bandung : Nusa Media, h. 5

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peran adalah pemain sandiwara. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dan fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.

2. Fungsi Partai Politik.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankannya. Adapun dalam mencari kekuasaan partai politik akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan kekuasaan,

¹⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) pasal 1 ayat (1)

pendekatan-pendekatan tersebut merupakan komunikasi dengan partai politik lain dengan masyarakat serta dengan kelompok kepentingan. Sedangkan cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan ikut serta pemilihan umum (pemilu). Serta untuk mempertahankan kekuasaan partai politik akan memaksimalkan kekuasaan yang sudah dimiliki untuk membuat suatu strategi yang baik agar kekuasaan tersebut bisa dipertahankan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya adalah melakukan kampanye, selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik adalah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).

Sedangkan fungsi dari partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sarana sosialisasi politik
- c. Sarana rekrutmen politik
- d. Sarana mengelola konflik

Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peran yaitu:

- a. Dalam proses pendidikan politik

¹⁸ Miriam Budiardjo, (2012), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, h. 75

- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Dwight King menyatakan peran utama partai politik terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Memberikan jembatan institusional antara warga negara dan pemerintah.
- b. Merancang dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu.
- c. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.

Sedangkan menurut Sigmund Neumann fungsi dari partai politik terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Tugas utama partai politik adalah mengatur kehendak umum yang kacau.
- b. Mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik
- c. Menjadi penghubung antara pemimpin dan pengikut
- d. Memilih para pemimpin.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berfungsi sebagai sarana¹⁹:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Pasal 11 ayat (1) Tahun 2008 tentang Partai Politik

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russeel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg, fungsi partai politik terbagi menjadi 3 yaitu:²⁰

- a. Partai di elektorat
 - 1). Menyederhanakan pilihan
 - 2). Pendidikan warga negara
 - 3). Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas
 - 4). Mobilisasi sebagian organisasi
- b. Partai sebagai organisasi Rekrutmen kepentingan politik dan mencari pejabat pemerintah
 - 1). Pelatihan sebagai elit politik
 - 2). Pengartikulasian kepentingan publik

²⁰ Russel J. Dalton, Martin P. Wattenberg, (2000), *Parties Without Partisans Political Change in Advanced Industrial Democracies*, New York : Oxford University Press, h. 5

3). Pengagresian kepentingan politik

c. Partai dipemerintahan

1). Menciptakan mayoritas pemerintahan

2). Pengorganisasian pemerintahan

3). Implementasi tujuan kebijakan

4). Mengorganisasikan ketidak sepakatan dengan oposisi

5). Menjamin tanggung jawab pemerintah

6). Kontrol terhadap administrasi pemerintah

7). Memperkuat stabilitas pemerintahan.

3. Kerangka Pemikiran fungsi partai politik

Sebagaimana sudah dijelaskan pada fungsi partai pada penjelasan di atas, tergambar bahwa partai politik mempunyai peran dan fungsi vital dalam memenangkan calon-calon yang dia usung. Dalam kasus pilkada Musi Banyuasin 2017 paslon Dodi Reza dan Beni diusung oleh 11 partai politik dan bersaing melawan calon independen yaitu pasangan Amiri Aripin dan Ahmad Toha yang tidak diusung oleh partai manapun. Tapi dari hasil perolehan suara jumlah suara yang diperoleh pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi berada dibawah jumlah suara golput dan suara perolehan Amiri Aripin dan Ahmad Toha.

Berdasarkan kasus ini peneliti akan melakukan analisa terhadap fungsi partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Miriam Budiardjo.

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari Miriam Budiardjo mengenai fungsi partai politik, dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menilai bahwa kerangka pemikiran Miriam Budiardjo inilah yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Sarana Komunikasi Politik

Secara harfiah komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Sedangkan jika dihubungkan dengan politik, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.²¹

Dalam suatu proses komunikasi politik, partai politik berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikan politik yang menyampaikan segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan dan kebijaksanaan tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat. Kedudukan partai politik yang berada diantara masyarakat dan pemerintah membuat partai politik menjadi suatu komponen penting dalam sistem politik.

²¹ Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, h. 24

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.²² Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Dalam sosialisasi politik terdapat metode cara penyampaian pesan yaitu melalui pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Pendidikan politik adalah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbo-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan.

Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan. Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai politik.

²² Firmanzah, *Op. Cit.*

c. Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Jack C. Plano rekrutmen adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik adalah merujuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.²³

Untuk melakukan fungsi rekrutmen tersebut maka diperlukanlah institusi atau agen-agen tertentu, baik formal maupun informal. Partai politik yang merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik. Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas.

d. Sarana Mengelola Konflik

Dalam sebuah negara yang demokratis, munculnya konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini disebabkan karena semakin majemuknya masyarakat dan meningkatnya daya kritis dari setiap individu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan benar maka akan menimbulkan kekacauan yang mengarah pada aksi-aksi fisik antar

²³ Jack C. Plano, dkk (1985), *Kamus Analisis Politik*, (terj.), Jakarta : Rajawali, h 221.

individu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik.

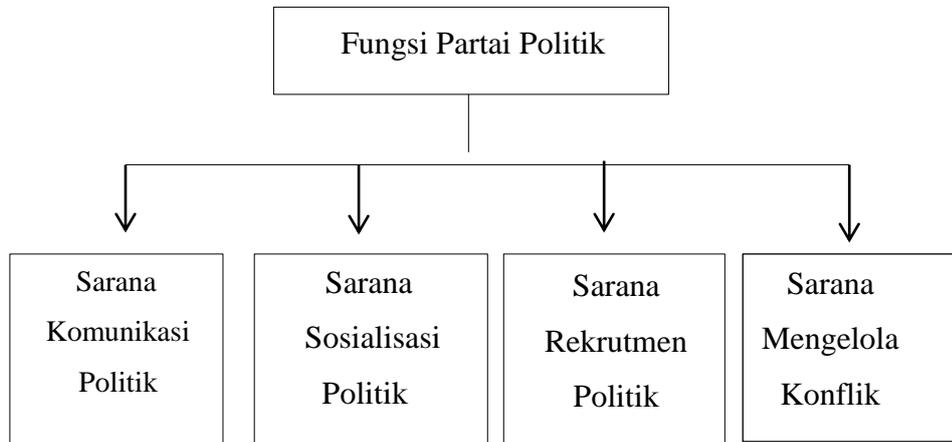
Jika terjadi suatu konflik antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya permasalahan pembebasan lahan, permasalahan suku mayoritas dan minoritas, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan ataupun cara-cara yang dilakukan oleh partai, seperti sering mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya biasa sampai luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai yang berskala besar ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah.²⁴

Kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana fungsi partai politik pada pilkada tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pilkada tahun 2017 peranan dan fungsi partai politik, dalam pilkada Musi Banyuasin 2017 partai politik pengusung Dodi Reza dan Beni Hernedi terbukti tidak cukup berfungsi dalam kemenangan pilkada. Hal itu terbukti dari angka golput yang cukup tinggi yaitu mencapai 39,5 %, maka dari itu peneliti ingin menganalisis bagaimana sesungguhnya, fungsi dari partai politik pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi pada pilkada Musi Banyuasin 2017.

²⁴ Muhadam Labolo, *Op.Cit*

Bagan I. 1

Fungsi Partai Politik



Dari bagan diatas menjelaskan tentang fungsi partai politik, setidaknya partai politik paling sedikit memiliki ke 4 (empat) fungsi tersebut dan setiap partai politik dituntut untuk memaksimalkan fungsinya ketika menghadapi pemilu dan pilkada.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu, suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, kualitatif dalam penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap ke sebelas fungsi partai politik pengusung Dodi Reza dan Beni Henedi pada pilkada Musi Banyuasin 2017.

Jadi tipe dan pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan penggambaran secara kualitatif tentang bagaimana peran dan fungsi yang dilakukan partai politik pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Henedi pada pilkada Musi Banyuasin 2017.

²⁵ SanapiahFaisal, (2008), *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 72

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, h.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti berkaitan fungsi partai politik pada pemilihan kepala daerah Musi Banyuasin tahun 2017 berdasarkan analisa terhadap partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi.

2. Data Dan Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu dokumen-dokumen yang memberikan gambaran yang berkaitan dengan hasil pilkada Musi Banyuasin tahun 2017, serta informasi yang terkandung dalam sumber-sumber data tersebut. Didukung oleh Buku-buku / literatur yang menguraikan tentang fungsi dan peran partai politik. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPUD Musi Banyuasin, Sekretaris Jendral partai pengusung

pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi, serta hasil dari observasi peneliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai fungsi partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi. Melalui penelusuran secara langsung di lapangan dan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan fungsi partai politik

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan ke 6 (enam) sekretaris jendral partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi, yaitu Jon Kenedi (Sekretaris Jendral DPC PDIP), HRusdi Hamid (Sekretaris Jendral DPD Golkar), Oekto Feriansyah (Sekretaris Jendral DPC Demokrat), Bambang Siswanto

²⁷ Sutrisno Hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, h.193.

(Sekretaris Jendral DPC Hanura), Edi Susanto (Sekretaris Jendral DPC Nasdem), Rusdi Hasir (Sekretaris Jendral DPC PKB)

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen yang digunakan dalam peneliti ini adalah berupa dokumen rekapitulasi perolehan suara pada pilkada 2017 yang bersumber dari KPU, serta dokumen-dokumen lain yang didapatkan oleh peneliti dari informan yang ditemui.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tetapi fokus dari penelitian ini adalah orang yang menjadi dewan pengurus cabang dari partai politik pengusung Dodi Reza dan Beni Hernedi pada pemilihan kepada daerah Musi Banyuasin tahun 2017.

5. Teknik Analisa Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁹ Empat tahap tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut

²⁸ Moleong, Lexy,(2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.240

²⁹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif BukuSumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press. h. 15.

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari 6 (enam) Sekretaris Jendral DPC/DPD Partai pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Henedi yaitu Sekretaris Jendral DPC Partai PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Hanura dan Nasdem. Data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab yang berkenaan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan mempertajam hasil dari pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dan dipilih bagian-bagian yang berkenaan dengan permasalahan fungsi partai politik. Adapun diluar dari permasalahan tersebut akan dikesampingkan oleh peneliti, hal ini bertujuan agar pembahasan yang peneliti buat benar-benar menjawab apa yang menjadi permasalahan.

c. Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.

Setelah peneliti mereduksi data dan mengambil hal-hal yang penting dari hasil wawancara, peneliti menyajikan data-data tersebut dengan dilandasi teori yang telah peneliti tetapkan sehingga dengan adanya teori tersebut akan terarah pada poin-poin apa saja yang akan dibahas pada saat penyajian data ini.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, bahwa peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar setelah diteliti menjadi jelas sehingga tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini peneliti membagi sistematika penulisan kedalam 4 bab yaitu:

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, metodologi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tetapi Fokus dari penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas mengenai proses analisis dan pemaknaan data yang telah di dapat. Data-data yang telah didapat dianalisis menggunakan alat analisis berupa kerangka pemikiran Fungsi Partai Politik dari Miriam Budiardjo yang dipakai dalam penelitian ini, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab keempat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi penelitian, bagian ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang membahas mengenai Fungsi Partai Politik.